

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Apeldoorn, L.J. Van. 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan XIII, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Arif Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Ashsofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta;
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Hadjon, Philipus. M, 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan IV. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Hadisuprpto, Hartono Dkk. 1987, *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*, UII Press, Yogyakarta;
- Hanitijo Soemitro, Ronny. 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- HR. Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I dan Buku II, Cetakan IV, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta;

- Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung;
- Marbun, S.F. 1993, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Cetakan I. Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta;
- _____. 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan I, Liberty, Yogyakarta;
- Martono, K., 2009, *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009*, CV Mandar Maju, Jakarta;
- Martono, K, 2012, *Hukum Udara Nasional Dan Internasional Publik (Public International And National Air Law)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Martono, K, 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Moeljanto, 1995, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana, Pidana diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalies ke VI Universitas Gadjah Mada, di Sitihihnggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1995*;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- M. Solehuddin, 2003, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Tract System & Implementasinya*, Penerbit Rajawali, Jakarta;
- Pramono, Agus. *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa Ghalia Indonesia*, Bogor;
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta;

Prodjohamidjo Martiman, 1996, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*

Indonesia 2, Pradnya Paramita, Jakarta;

Ridwan, H.R. 2002, *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan I, UII Press,

Yogyakarta;

Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan*

Kebijakan, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Sapardjaj Komariah Emong, 1996, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material*

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung;

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung;

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas

Indonesia, Jakarta;

Wijoyo, Suparto, 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*,

Cetakan I. Airlangga University Press, Surabaya;

Wiyono, R, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua,

Sinar Grafika, Jakarta;

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

(LNRI Tahun 1986 Nomor:77 dan TLNRI Nomor: 3344);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

(LNRI Tahun 2004 Nomor:160 dan TLNRI Nomor: 5079);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, (LNRI Tahun 2009 Nomor:1 dan TLNRI Nomor: 4956);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, (LNRI Tahun 1995 Nomor:68 dan TLNRI Nomor: 3610);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan, (BNRI Tahun 2015 Nomor : 286);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, (BNRI Tahun 2015 Nomor : 1844);

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 623 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (*Flight Approval*).

Hasil pengunduhan dari internet :

http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/timeline/Peraturan%20Menteri,

diunduh tanggal 1 Juni 2017;

<http://hubud.dephub.go.id/?id/llu/index/filter:category,1;tahun,0;bulan,0;airpo>

[rt,0](#) diunduh tanggal 1 Juni 2017;

<http://surabaya.bisnis.com/read/2>, diunduh tanggal 5 Agustus 2016;

<https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/12/double-track-system-pada->

[sistem-sanksi-hukum-pidana/](#), diunduh tanggal 20 Juli 2016;

<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2384>, diunduh tanggal 4 Januari

2017;